



**MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 1774 /M/XI/2018  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Dua lembar  
Hal : Pendelegasian Pembukaan Rekening  
Dana Cadangan Alutsista

Jakarta, 26 November 2018

Kepada

Yth. 1. Panglima TNI  
2. Kasad  
3. Kasal  
4. Kasau  
5. Sekjen Kemhan

di

Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-8755/PB/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Penyelesaian sisa UP Satker Pusat dan penyampaian format dokumen yang diperlukan dalam pembukaan rekening Dana Cadangan Alutsista.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, untuk menindaklanjuti PMK Nomor 143/PMK.05/2018 dan untuk menampung sisa alokasi dana atas kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran setiap Unit Organisasi, Menhan mendelegasikan kepada setiap Kepala Unit Organisasi untuk menyampaikan permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan dengan cara sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan penelitian bahwa penyedia barang/jasa mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Selanjutnya PPK meminta verifikasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
  - b. Sesuai penelitian PPK dan verifikasi APIP tersebut di atas, Kepala Unit Organisasi selaku KPA dapat memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan menyampaikan pemberitahuan ke Menteri Pertahanan.

- c. Penyampaian permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista ditandatangani oleh KPA (Panglima TNI, Kas Angkatan dan Sekjen Kemhan).
  - d. Permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista oleh KPA dilampiri:
    - 1) Rekapitulasi sisa dana atas kontrak yang belum dibayarkan dalam bentuk rupiah maupun valas, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
    - 2) Pernyataan bahwa telah terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya diluar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
  - e. Surat permohonan yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang akan dilanjutkan merupakan pengadaan barang/jasa berupa Alutsista dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
  - f. Surat permohonan pembukaan Rekening Dana Cadangan Alutsista harus sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir (tanggal 29 November 2018).
3. Demikian untuk menjadikan periksa.



Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu

Tembusan:

1. Irjen Kemhan
2. Irjen TNI
3. Irjen Angkatan
4. Dirjen Renhan Kemhan
5. Asrenum Panglima TNI
6. Asrena Angkatan
7. Karoren Setjen Kemhan
8. Kapusku Kemhan
9. Kapusku TNI
10. Dirkuad
11. Kadisku Angkatan
12. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Lampiran I Surat Menteri Pertahanan  
 Nomor : B/1774 /M/XI/2018  
 Tanggal : 26 November 2018

FORMAT REKAPITULASI SISA DANA ATAS KONTRAK YANG BELUM DIBAYARKAN

REKAPITULASI SISA DANA ATAS KONTRAK YANG BELUM DIBAYARKAN  
 Per Tanggal ..... (1)

Kementerian Pertahanan  
 Eselon I/JO : ..... (2)  
 Satuan Kerja : ..... (3)

No	Nomor Kontrak/Adendum	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Mata Uang	Total Nilai Kontrak		Nilai Kontrak yang Sudah Dibayarkan		Nilai Kontrak yang Belum Dibayarkan yang Rencananya Dipindahkan ke Rekening Dana Cadangan	
					Valas	Rupiah	Valas	Rupiah	Valas	Rupiah
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

\*) Format lampiran ini memuat informasi dasar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN  
REKAPITULASI SISA DANA ATAS KONTRAK YANG BELUM DIBAYARKAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan tanggal rekapitulasi
(2)	Diisi dengan kode dan uraian eselon I /UO
(3)	Diisi dengan uraian dan kode satker
(4)	Diisi dengan nomor urut
(5)	Diisi dengan nomor kontrak dan/atau adendum
(6)	Diisi dengan tanggal mulainya kontrak
(7)	Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak
(8)	Diisi dengan mata uang dalam kontrak
(9)	Diisi dengan nilai kontrak dalam valas
(10)	Diisi dengan nilai kontrak dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen kontrak valas nomor (9) dalam Rupiah
(11)	Diisi dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan dalam valas
(12)	Diisi dengan nilai kontrak yang sudah dibayarkan dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen valas nomor (11) dalam Rupiah
(13)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang rencananya akan dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam valas
(14)	Diisi dengan nilai kontrak yang belum dibayarkan yang rencananya akan dipindahkan ke rekening dana cadangan dalam Rupiah (IDR) atau nilai ekuivalen valas nomor (13) dalam Rupiah



Menteri Pertahanan,

*Ryamizard Ryacudu*  
Ryamizard Ryacudu

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP/NRP : ..... (2)  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan Alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu :  
.....(4).....

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(5), .....(6)  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Materai

..... (7)  
..... (8)  
NIP/NRP ..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
(2)	Diisi dengan NIP atau NRP penanda tangan surat
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(4)	Diisi dengan kondisi yang terjadi sesuai dengan pasal 83 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018
(5)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(6)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat
(7)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, dibubuhi stempel/cap dinas dan disertai materai
(8)	Diisi dengan nama lengkap penandatanganan surat pernyataan
(9)	Diisi dengan NIP atau NRP penandatanganan surat pernyataan



Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu